



2015 2020 2025 2030 2045



Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
2015



**Potensi dan Implikasi
Bonus Demografi di Provinsi Banten
Tahun 2015-2035**

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
2015

Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035

Penanggung Jawab

Drs. Suyono Hadinoto, M.Sc

Tim Penulis

Ir. Said Rusli, MA

Dra. Rani Toersilaningsih, MA

Ir. Djusni Meirida, MURP

DR. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MA

Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos

Kontributor

Prof. Dr. Budi Utomo, MPH, PhD.

Dr. Ninasapti Triaswati SE, M.Sc

Dr. Tris Eryando, MA

Dr. Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS.

Leo Agustino, PhD.

Ir. Rini Handayani, MSi

Sri Rahayu Sanusi, SKM, MKes, PhD.

Listya Endang Artiani, SE, MSi, CSRS.

Pengolah Data

Aliya Faiqoh Zain, S.Si

KATA SAMBUTAN

Pada saat ini bangsa Indonesia tampak bersemangat membicarakan isu bonus demografi. Terutama bila dikaitkan dengan kesiapan provinsi di Indonesia dalam memanfaatkan momentum emas transisi demografi ini. Namun terkadang pemahaman kita terhadap isu pemanfaatan bonus demografi belum tentu sama. Buku kajian analisis dampak kependudukan yang berjudul “Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035” ini sangat tepat untuk membahas isu pemanfaatan bonus demografi pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik diterbitkannya buku kajian ini, karena fenomena pemanfaatan bonus demografi, diuraikan secara mendalam ditinjau dari berbagai aspek pembangunan: sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pemahaman masyarakat tentang konsep bonus demografi sangat penting. Tahapan bonus demografi umumnya didahului dengan transisi demografi, yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan angka kematian. Sebagai dampaknya, proporsi penduduk yang memasuki usia angkatan kerja mulai meningkat. Bonus demografi terancam tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila tingkat kelahiran belum dapat diturunkan. Sementara di sisi lain, proporsi penduduk lansia juga mulai meningkat sebagai akibat peningkatan status kesehatan masyarakat dan penurunan tingkat kematian.

Stagnasi angka fertilitas ternyata berdampak secara nyata dalam menghasilkan fase tahapan bonus demografi hingga mencapai puncaknya yang disebut *window of opportunity*. Data jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang menyatakan kelebihan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa dari angka proyeksi sebelumnya, serta angka kelahiran total, atau *Total Fertility Rate* (TFR) hasil SDKI 2012 yang cenderung konstan, ternyata merubah perkiraan durasi dari *window of opportunity* maupun besaran angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Semula *window of opportunity* diproyeksikan terjadi selama 10 tahun (2020-2030) dengan angka *dependency ratio* sebesar 44 per 100. Namun dengan kondisi tingkat fertilitas yang stagnan, *window of opportunity* diproyeksikan terjadi dalam durasi yang lebih singkat, yaitu 4 tahun, dari 2028 sampai 2031. Sedangkan kisaran angka *dependency ratio* lebih tinggi yaitu sebesar 47 per 100. Uraian diatas menunjukkan betapa pentingnya arti penurunan TFR bagi terjadinya durasi *window of opportunity* maupun besaran angka *dependency ratio*. Kegagalan menurunkan angka fertilitas, akan memperbesar proporsi penduduk non-produktif dan berdampak membesarnya beban ketergantungan.

Untuk mengantisipasi ancaman kegagalan pemanfaatan bonus demografi, berbagai faktor penentu harus diperhatikan, seperti: penanganan anak usia sekolah, peningkatan etos kerja, pendidikan kewirausahaan, serta penekanan kompetensi *soft skills*. Berbagai isu penting harus dicermati dan diantisipasi, antara lain aspek kesehatan perlu ditingkatkan, pemberdayaan perempuan agar masuk pasar kerja sehingga dapat meningkatkan tabungan keluarga, pendidikan anak harus ditingkatkan, penurunan fertilitas secara signifikan sehingga tercapai norma keluarga kecil bahagia sejahtera, serta pemberdayaan lansia tangguh yang produktif. Semuanya dilakukan agar Indonesia dapat terbebas dari jebakan negara berkembang atau *low middle income trap*, yang tentunya berdampak negatif terhadap provinsi.

Beberapa temuan data menunjukkan bahwa saat ini provinsi Banten telah memasuki era bonus demografi. Maka pertanyaan yang penting adalah: intervensi apakah yang harus dilakukan terhadap segmen kelompok tertentu? Misalnya: bagi angkatan kerja yang masih menganggur, perlu dilakukan intervensi peningkatan akses terhadap lapangan kerja dan upaya peningkatan produktivitas. Sedangkan bagi yang telah bekerja, perlu ditingkatkan keterampilan/ *skills* dan produktivitasnya agar lebih berdaya saing di pasar kerja.

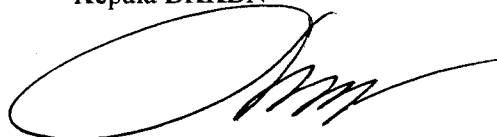
Penentuan intervensi seperti di atas, harus didasarkan pada analisis terhadap *timing* pemanfaatan bonus demografi, dalam arti harus ditelaah kohor kelompok penduduk pada usia tertentu. Misalnya apabila periode *window of opportunity* di provinsi Banten terjadi pada tahun 2035 artinya akan terjadi 22 tahun mendatang. Berarti mulai tahun 2014 ini, para calon ibu harus diberikan edukasi tentang perencanaan pengaturan kelahiran, kehamilan dan persalinan yang sehat, serta pengetahuan seribu hari pertama dalam kehidupan yang baik. Karena bayi yang lahir pada tahun 2014 ini pada tahun 2028 akan berusia sekitar 22 tahun, dan bersiap akan memasuki angkatan kerja produktif, atau sedang mengenyam pendidikan tinggi. Pada tahun 2014 ini, juga perlu digarap kelompok bayi dan balita melalui pengasuhan tumbuh kembang anak secara optimal karena 22 tahun lagi, bayi-bayi tersebut akan berusia 27 atau 28 tahun, telah memasuki angkatan kerja. Dengan pengasuhan tumbuh kembang yang baik, bayi dan balita pada kohor saat ini akan mengalami peningkatan kemampuan kognitif maupun psikomotorik yang pesat.

Pada tahun 2014 ini juga perlu digarap anak usia sekolah dan remaja (<20 tahun), karena 22 tahun mendatang, siswa sekolah remaja ini akan berusia 32 hingga 42 tahun, yang akan memainkan peran dominan mereka di bidang ketenagakerjaan. Kepada siswa remaja tersebut, saat ini kita perlu menanamkan semangat kewirausahaan, teknologi dan informasi, dan pendidikan karakter, serta keterampilan agar siap pakai setelah lulus sekolah nanti. Dengan demikian, proses "*transition from school to work*" dapat berjalan lancar tanpa kendala, dan tenaga lulusan sekolah dapat sepenuhnya terserap ke dalam pasar kerja dengan kompetensi yang memadai, atau kita kenal dengan prinsip *link and match* ketenagakerjaan.

Akhir kata, semoga upaya luhur kita dalam perencanaan pembangunan provinsi Banten dikaitkan dengan pemanfaatan bonus demografi, dapat memetik hasil yang positif sesuai harapan kita, yakni demi memajukan kesejahteraan penduduk Banten secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum dalam beberapa dekade mendatang. Amin Ya Robbal Alamin. Terima kasih.

Jakarta, 3 Mei 2015

Kepala BKKBN



Surya Chandra Surapaty

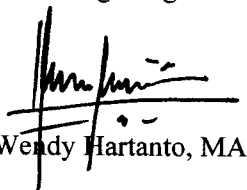
KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan buku **Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035** dapat diselesaikan. Bonus Demografi merupakan peluang yang tak mungkin terulang dalam satu generasi. Peluang Bonus Demografi harus bisa dijadikan momentum bersama bagi semua pihak agar kita tak terjerembab dalam persoalan-persoalan yang tak kunjung usai, sehingga transisi demografi yang merupakan proses penurunan angka kelahiran sampai terciptanya tingkat populasi yang stabil. Transisi demografi juga akan mengubah struktur usia dari populasi penduduk, dimana proporsi penduduk muda (usia 0-14 tahun) mengalami penurunan, proporsi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) meningkat pesat, dan proporsi penduduk usia tua (66 tahun keatas) meningkat perlahan, dengan demikian Bonus Demografi merupakan keuntungan secara ekonomis yang disebabkan penurunan proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Bagi Provinsi Banten ada rentan waktu 30 tahun lagi untuk memanfaatkan SDM agar bisa memanfaatkan peluang emas di Provinsi Banten yang terjadi pada tahun 2015-2045, dengan angka *dependency ratio* berkisar antara 0,4-0,5 berarti 100 orang usia produktif hanya menanggung 40-50 orang usia tidak produktif. Peluang ini juga harus dijadikan momentum emas bagi semua pihak khususnya pemerintah maupun mitra kerja dengan cara menanamkan investasi modal SDM untuk menggantikan angkatan kerja yang berpendidikan rendah dengan angkatan kerja baru yang memiliki pendidikan dengan keterampilan yang lebih baik.

Semoga buku tentang pembangunan SDM di Provinsi Banten dalam Memanfaatkan Bonus Demografi tahun 2014-2045 dapat dimanfaatkan sebagai kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seluruh sektor pembangunan di Provinsi Banten. Penyusunan buku ini juga tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran dan masukan. Akhirnya, kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 September 2014
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk



DR. Wendy Hartanto, MA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN	4
1.4 RUANG LINGKUP	4
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL DAN METODOLOGI	5
2.1 LANDASAN TEORITIS	5
2.1.1 Bonus Demografi	5
2.1.2 Transformasi Ekonomi	7
2.1.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia	11
2.2 LANDASAN EMPIRIS	11
2.2.1 Kebijakan Pembangunan Nasional	11
2.2.2 Kebijakan Pembangunan di Provinsi Banten	16
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN.....	19
2.4 METODOLOGI	20
2.4.1 Pendekatan	20
2.4.2 Data	21
2.4.3 Metode Analisis	21
BAB III KARAKTERISTIK WILAYAH PROVINSI BANTEN	22
3.1 KONDISI GEOGRAFIS PROVINSI BANTEN.....	22
3.1.1 Kondisi Geografis	22
3.1.2 Iklim	22
3.1.3 Topografi	23
3.1.4 Luas Wilayah dan Wilayah Administrasi	23
3.2 KONDISI DEMOGRAFI PROVINSI BANTEN	24
3.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	24
3.2.2 Persebaran Penduduk	26
3.2.3 Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi	28
3.3 KONDISI SOSIAL	30

3.3.1 Kesehatan	30
3.3.2 Pendidikan	36
3.3.3 Kualitas SDM	40
3.4 SITUASI EKONOMI	40
3.4.1 Tenaga Kerja	40
3.4.2 Kondisi Ekonomi	44
3.4.3 Kemiskinan	46
BAB IV PROVINSI BANTEN KE DEPAN: SUATU ANALISIS	49
4.1 JUMLAH DAN LAJU PERKEMBANGAN PENDUDUK	49
4.2 ANALISIS DAN PROYEKSI PENDIDIKAN	54
4.2.1 Pendidikan Usia Dini/Balita (Usia 1-5 Tahun)	54
4.2.2 Pendidikan Anak Usia Pra Sekolah (5-6 Tahun)	55
4.2.3 Pendidikan Sekolah Dasar (Usia 7-12 Tahun)	55
4.2.4 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat (Usia 13-15 Tahun)	57
4.2.5 Pendidikan SMA/Sederajat (Usia 16-18 Tahun)	59
4.2.6 Pendidikan Tinggi (Usia 19-24 Tahun)	63
4.3 ANALISIS DAN PROYEKSI KESEHATAN	64
4.3.1 Kelompok Ibu Hamil dan Melahirkan	65
4.3.2 Kelompok Bayi dan Balita	66
4.3.3 Kelompok Anak, Remaja dan Usia Muda	66
4.3.4 Sepuluh Penyakit dengan Jumlah Penderita Terbanyak	68
4.3.5 Implikasi Kebutuhan Sarana dan Ketenagaan Kesehatan	68
4.4. ANALISIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	70
4.4.1 Proyeksi Ketenagakerjaan Provinsi Banten	70
4.4.2 Karakteristik Tenaga Kerja	75
4.4.3 Tantangan dalam Pemenuhan Tenaga Kerja	79
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
5.1 KESIMPULAN	85
5.2 REKOMENDASI	86
5.2.1 Pendidikan	87
5.2.2 Kesehatan	88
5.2.3 Ekonomi dan Tenaga Kerja	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pencapaian Target Pembangunan Kesehatan pada RPJMN 2010-2014	14
Tabel 2.2 Pencapaian Target Pembangunan Pendidikan pada RPJMN 2010-2014.....	15
Tabel 2.3 Pencapaian Target Pembangunan Ekonomi pada RPJMN 2010-2014	15
Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013.....	25
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Banten Menurut Kabupaten/Kota 2011-2013.....	27
Tabel 3.3 Jumlah Migrasi Risen Neto Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2010	29
Tabel 3.4 Persentase Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas yang Dilayani oleh Tenaga Kesehatan, 2012	33
Tabel 3.5 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur Provinsi Banten (SDKI 2012)	33
Tabel 3.6 Kasus Malaria di Provinsi Banten 2012	35
Tabel 3.7 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2010-2011	35
Tabel 3.8 IPM Per Kabupaten di Provinsi Banten (BPS 2013).....	40
Tabel 3.9 PDRB Provinsi Banten Berdasarkan Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2009-2003	44
Tabel 3.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha 2009-2013	45
Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota	46
Tabel 4.1 Proyeksi Penduduk Banten 2015	51
Tabel 4.2 Proyeksi Penduduk Banten 2020	52
Tabel 4.3 Proyeksi Penduduk Banten 2025	52
Tabel 4.4 Proyeksi Penduduk Banten 2030	53
Tabel 4.5 Proyeksi Penduduk Banten 2035	53
Tabel 4.6 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar (SD), APM SD, Jumlah Murid, Kebutuhan Guru, dan Gedung Sekolah Provinsi Banten 2010-2035...	56
Tabel 4.7 Proyeksi Jumlah penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP), APM SMP, Jumlah Murid, Kebutuhan Guru, dan Gedung Sekolah Provinsi Banten 2010-2035	58
Tabel 4.8 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Provinsi Banten Tahun 2008-2013	60
Tabel 4.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Umum (SMA), APM SMA, Jumlah Murid, Kebutuhan Guru, dan Gedung Sekolah Provinsi Banten, 2010-2035	61
Tabel 4.10 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi (PT), APM PT, Jumlah Mahasiswa, Kebutuhan Dosen, dan Gedung Sekolah, Provinsi Banten 2010-2035	64
Tabel 4.11 Proyeksi Indikator Bidang Kesehatan Provinsi Banten, 2010-2035	65

Tabel 4.12	Proyeksi Kebutuhan Tenaga dan Sarana Kesehatan di Provinsi Banten, 2010-2035	69
Tabel 4.13	Proyeksi Ketenagakerjaan Provinsi Banten	73
Tabel 4.14	Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2035	74
Tabel 4.15	Proyeksi Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin, 2010-2035	75
Tabel 4.16	Proyeksi Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Provinsi Banten Menurut Kelompok Umur, 2010-2035	76
Tabel 4.17	Proyeksi Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja di Provinsi Banten Menurut Pendudukan tahun 2010-2035	77
Tabel 4.18	Proyeksi Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja di Provinsi Banten Menurut Pekerjaan, 2010-2035.....	78
Tabel 4.19	Proyeksi Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja di Provinsi Banten Menurut Status Pekerjaan, 2010-2035	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Transisi Demografi dan Rasio Beban Ketergantungan	5
Gambar 2.2 Proses Terjadinya Masa Bonus Demografi dan Jendela Kesempatan (<i>The Windows of Opportunity</i>)	6
Gambar 2.3 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025	13
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Upaya Pemanfaatan Bonus Demografi di Provinsi Banten.....	20
Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Banten	23
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Banten Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1961-2012	24
Gambar 3.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2013	27
Gambar 3.4 Tren Angka Fertilitas (TFR), SDKI 2002-2012	28
Gambar 3.5 Angka Fertilitas Total (TFR) Menurut Kabupaten/Kota, 2012	28
Gambar 3.6 Angka Kematian Bayi Tahun 2002/2003-2012	29
Gambar 3.7 Persentase Kelahiran dengan Laporan Berat Badan bayi Hasil SDKI 2007-2012	30
Gambar 3.8 Jumlah Penderita Gizi Buruk, Jumlah yang Ditangani dan Persentase Perawatan Gizi Buruk, 2011-2012	31
Gambar 3.9 Jumlah Penderita Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Provinsi Banten, 2011- 2012	31
Gambar 3.10 Persentase Bayi dan balita yang Memperoleh Imunisasi 2012	32
Gambar 3.11 Persentase Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 2002/2003- 2012	33
Gambar 3.12 Jumlah Penderita Penyakit 10 Terbesar di Provinsi Banten 2012	34
Gambar 3.13 Grafik Kasus HIV dan AIDS Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota, 2012	34
Gambar 3.14 Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten, 2011-2012	36
Gambar 3.15 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Provinsi Banten, 2010-2012	36
Gambar 3.16 APK Menurut Tingkatan Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Banten 2012/2013	37
Gambar 3.17 APM Menurut Angka Tingkatan Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Banten 2012/2013	37
Gambar 3.18 Persentase Guru SD/Sederajat Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2012/2013	38
Gambar 3.19 Persentase Guru yang Memperoleh Sertifikasi Menurut Jenjang Sekolah, Provinsi Banten 2012	38
Gambar 3.20 Persentase Gedung Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Bangunan 2012, Provinsi Banten 2012	39
Gambar 3.21 TPT dan TPAK Provinsi Banten 2010-2013	41
Gambar 3.22 Jumlah Pekerja Per Sektor Menurut Tingkat Pendidikan 2011	43
Gambar 3.23 Jumlah Pekerja Per Sektor Menurut Tingkat Pendidikan 2014	43

Gambar 3.24	Kecenderungan Sumbangan Sektor pada PDRB di Provinsi Banten, Tahun 2009-2013.....	44
Gambar 3.25	Sumbangan Kabupaten/Kota dalam PDRB Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000	45
Gambar 3.26	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota, 2009-2013	46
Gambar 3.27	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota 2009-2013	47
Gambar 4.1	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Banten Tahun 2010-2035.....	49
Gambar 4.2	Proyeksi TFR dan IMR Provinsi Banten, 2010-2035	50
Gambar 4.3	Proyeksi Piramida Penduduk Banten 2015-2035	51
Gambar 4.4	Proyeksi Penduduk Provinsi Banten Berumur 15 Tahun Keatas dan TPAK 2005-2035	71
Gambar 4.5	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Banten Yang Bekerja dan Menganggur 2010-2035	72
Gambar 4.6	Jumlah BLK dan Program Studi Provinsi Banten 2012	83
Gambar 4.7	Jumlah BLK dan Program Studi Provinsi Banten 2012	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Provinsi Banten yang baru disahkan pada tahun 2000 dengan UU No 23 tahun 2000 sebagai provinsi terpisah dari Provinsi Jawa Barat, telah mengalami perkembangan penduduk yang cukup pesat. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1971 penduduk di wilayah eks-Kerasidenan Provinsi Banten baru berjumlah sekitar 3 juta jiwa¹ dan telah meningkat menjadi 11.7 juta jiwa pada tahun 2014, hal ini berarti dalam 4 dasawarsa penduduk Provinsi ini telah menjadi lebih dari 3 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat diduga disebabkan oleh tingginya migrasi masuk ke wilayah ini sejak tahun 90-an, disamping angka pertumbuhan alaminya. Provinsi Banten yang berdekatan dengan DKI Jakarta telah menjadi wilayah penyangga sejak sebelum berdiri sebagai sebuah Provinsi. Pembangunan perumahan dan sentra-sentra industri memicu penduduk terutama DKI Jakarta untuk pindah dan menetap di wilayah ini.

Dari sisi demografi, Provinsi Banten telah berada pada fase akhir masa transisi demografi, yang ditandai dengan angka kelahiran dan angka kematian yang rendah. Jika pada tahun 70-an angka kelahiran Provinsi Banten masih berada pada angka 5,12 maka tahun 2012 angka fertilitas total (TFR) sudah menurun menjadi 2,3 (BPS 2012). Sementara itu angka kematian bayi telah mengalami penurunan dari 66 tahun 2000 menurun menjadi 32 pada tahun 2012. Angka kematian kasar telah mencapai angka 5,3 per 1000 penduduk.

Sejalan dengan terjadinya transisi demografi di Provinsi Banten, terjadi perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda (0-14 tahun) dan proporsi penduduk tua belum begitu meningkat. Perubahan ini pada dasarnya menjadi suatu keuntungan bagi pembangunan ekonomi Provinsi Banten, karena angka rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) telah menurun dari 48,5 pada tahun 2010, menjadi 46,4 pada tahun 2015, dan diperkirakan akan terus menurun hingga tahun 2030 menjadi 39.9 dan selanjutnya diperkirakan akan meningkat menjadi 40,8 pada tahun 2035. Hal ini berarti jumlah orang yang harus ditanggung oleh penduduk produktif secara ekonomi telah menurun, dan masa ini disebut sebagai **masa bonus demografi**. Periode bonus demografi ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Bonus Demografi yang terjadi di Provinsi Banten diperkirakan akan berlangsung panjang melebihi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hal ini merupakan peluang yang lebih besar bagi pemerintah Provinsi Banten untuk mengaktualisasikan kebijakan-kebijakan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Provinsi Banten, meningkatkan peluang kerja dan investasi serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi lainnya termasuk sarana dan prasarana fisik (jalan, pelabuhan, bendungan, irigasi, pergudangan, dll). Secara teori masa bonus demografi menjadi suatu masa dimana

¹ Menurut hasil Sensus Penduduk 1971, penduduk eks-Kerasidenan Provinsi Banten yang kemudian menjadi Provinsi Banten, masing-masing berpenduduk; Pandeglang 572 628 jiwa, Serang 859 367 jiwa, Tangerang 1 066 695, dan Lebak 546 364 jiwa. Pada tahun 1971, total penduduk keempat kabupaten itu adalah 3 045 054 jiwa. Lihat Biro Pusat Statistik, Penduduk Jawa Barat, Sensus Penduduk 1971, Seri E No.10 (Jakarta: BPS, 1973).

penduduk produktif akan mampu meningkatkan tabungan rumah tangga yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan investasi. Sementara itu bagi pemerintah, penduduk produktif yang besar dan berkualitas menjadi modal bagi pembangunan baik sosial maupun ekonomi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memanfaatkan bonus demografi adalah kemampuan dan kesungguhan pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas SDM yang baik serta penciptaan lapangan kerja produktif yang dapat menyerap seluruh SDM usia produktif tersebut.

Masa bonus demografi di Provinsi Banten perlu dimanfaatkan secara maksimal terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan nasional dan perubahan lingkungan strategis global seperti diberlakukannya *ASEAN Economic Community (AEC)*/Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir tahun 2015 ini. Dalam era *AEC* selain kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan, juga kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Tahun 2015 merupakan awal dibukanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja negara-negara anggota ASEAN ke Indonesia dan sebaliknya tenaga kerja dari Indonesia mampu mengisi kesempatan kerja yang terbuka di negara-negara anggota ASEAN diberbagai tingkatan (dari buruh rendahan sampai tingkat direksi). Kondisi ini seharusnya mendorong tenaga kerja di Provinsi Banten untuk menjadi tenaga kerja profesional, bukan lagi tenaga kerja domestik (sektor rumah tangga) maupun tenaga kerja kasar.

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang dikembangkan menjadi daerah sentra perekonomian terutama industri baik industri padat modal, padat teknologi maupun padat karya. Pengembangan industri di wilayah ini diharapkan mampu menciptakan peluang kerja, sekaligus menumbuhkan industri-industri kecil sebagai pendukung kebutuhan industri sedang dan besar sekaligus menumbuhkan sektor-sektor lainnya secara paralel dan terintegrasi. Namun sangat disadari bahwa pemanfaatan momentum bonus demografi dan masyarakat ekonomi ASEAN tidak mudah dilakukan, mengingat masih adanya permasalahan yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan data tahun 2014 telah mencapai skor 71,49 dan angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional, tetapi kesenjangan antar kabupaten/kota masih sangat tinggi (pada tahun yang sama IPM kabupaten Pandeglang baru mencapai 69,22 sementara IPM Kota Tangerang Selatan sudah mencapai 76,61). Situasi ini terkait dengan perbedaan kondisi pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan atau daya beli masyarakat antara wilayah Provinsi Banten bagian utara dengan wilayah Provinsi Banten bagian selatan.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah bahwa wilayah utara Provinsi Banten sedang berkembang menjadi wilayah industri dan sektor-sektor non pertanian lainnya, yang membutuhkan penduduk yang lebih berkualitas terutama ketrampilan dan pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan lebih berkembang di wilayah utara baik dalam hal sarana dan prasarannya maupun kualitas sumber daya manusianya. Dalam momentum pemanfaatan masa bonus demografi, ketertinggalan wilayah Selatan harus mulai dipikirkan dengan mempercepat pembangunan di wilayah ini terutama memodernisasi sektor pertanian yang masih menjadi andalan dan potensi terbesar baik di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Meskipun IPM Provinsi Banten telah mencapai angka yang cukup tinggi tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Banten masih didominasi penduduk berpendidikan rendah yaitu maksimal SMP. Hal ini dicerminkan dari rata-rata sekolah tahun 2012 yang baru mencapai 8,61 tahun atau belum lulus SMP. Pendidikan tidak hanya dicerminkan dari rata-rata lama sekolah tetapi juga dicerminkan oleh tingkat partisipasi murid, kualitas guru dan kualitas sekolah agar mampu mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas mestinya menyangkut sisi *hard skill* (ketrampilan dan keahlian) juga *soft skill* (sikap, perilaku, kedisiplinan, tanggungjawab dan etos kerja). Sementara data di lapangan menunjukkan bahwa kualitas lulusan pendidikan masih belum bisa dikatakan baik, karena banyak lulusan pendidikan menengah atas baik umum maupun kejuruan yang dindikasikan tidak terserap dalam pasar kerja yang ada di Provinsi Banten (berdasarkan hasil FGD dengan pelaku industri, pekerja yang mereka ambil berasal dari luar daerah Provinsi Banten). Sementara angka pengangguran terbuka di wilayah ini meskipun sudah menurun tetapi masih berada pada angka 9,90 persen (Provinsi Banten Dalam Angka 2013). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, per Agustus 2013 jumlah pengangguran di daerah tersebut mencapai 509 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, pengangguran lulusan SD/ sederajat sebanyak 140.040 orang, lulusan SMP/ sederajat sebanyak 127.070, dan lulusan diploma sampai pendidikan sarjana (S1) sebanyak 31.030 orang. Dan di antara delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu penyumbang pengangguran terbanyak. Jumlah pengangguran di Kabupaten Pandeglang berdasarkan survei Badan Pusat Statistika (BPS) 50 ribu jiwa, sedangkan yang tercatat di Dinas Sosial berdasarkan pembuatan kartu kuning (kartu pencari kerja) di Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) berjumlah 18 ribu jiwa. Sehingga diperlukan upaya yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja di Provinsi Banten. Artinya terdapat **dua beban ganda** yang harus dihadapi, yaitu mempersiapkan SDM lokal dan nasional yang berkualitas, disisi lain harus menghadapi persaingan bebas dengan tenaga kerja ASEAN.

Dari sisi kesehatan angka harapan hidup baru mencapai 65,23 tahun. Meskipun angka harapan hidup cukup besar tetapi angka kematian neonatal di wilayah ini masih tinggi 23 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2012), demikian pula kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 189 kasus pada tahun 2012. Data lain juga menunjukkan masih banyak ditemukannya penduduk penderita gizi kurang dan gizi buruk yang mencapai sebanyak 1.433 balita dari 1.124.758 balita pada tahun 2014. Kondisi ini menempatkan Provinsi Banten menjadi urutan ketiga daerah gizi buruk sesudah Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh asupan makanan bergizi, pendidikan ibu, kondisi ekonomi keluarga, pola asuh yang salah dan letak geografis yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Padahal kualitas SDM sangat ditentukan sejak bayi dalam kandungan, dengan asupan gizi yang baik. Kondisi-kondisi ini mengisyaratkan pemerintah dan masyarakat Provinsi Banten menghadapi permasalahan sosial, ekonomi dan budaya yang dapat menjadi kendala dalam meraih manfaat bonus demografi secara maksimal.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan menyusun kajian "**Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035**".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat dirumuskan masalah untuk kajian ini sebagai berikut.

1. Isu-isu strategis apa yang memerlukan program aksi (*action programs*) untuk “*Penyiapan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dalam Memaksimalkan Potensi Bonus Demografi*”?
2. Bagaimanakah strategi yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten dalam “*Penyiapan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dalam Memaksimalkan Potensi Bonus Demografi*” dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi Banten sekaligus mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten?

1.3 TUJUAN

Tujuan Umum

Menyusun strategi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten dalam rangka memanfaatkan bonus demografi melalui pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing global.

Tujuan Khusus

- a) Mengidentifikasi isu strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b) Melakukan analisis *supply and demand* tenaga kerja dalam mengoptimalkan bonus demografi.
- c) Merumuskan strategi pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan siklus hidup (*life cycle approach*).
- d) Memformulasikan program aksi pembangunan sumber daya manusia.

1.4 RUANG LINGKUP

Kajian ini dilakukan di wilayah Provinsi Banten, dengan ruang lingkup kajian adalah analisis penyiapan dan pemanfaatan bonus demografi di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 pada aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan.